

KELOMPOK KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Muhammad Hanri,

Ph.D.

hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.

nia.kurnia@lpem-

feui.org

DAFTAR ISI

Isu Terkini tentang
Pekerja Migran
Indonesia – 1

Kondisi Terkini Pekerja
Migran Indonesia – 2

Peran Remitansi di
Indonesia – 3

RINGKASAN

Kondisi pandemi turut mempengaruhi dinamika PMI yang ditempatkan di berbagai negara. Seiring dengan perkembangan krisis kesehatan dan perkonomian yang semakin pulih, beberapa negara sudah melonggarkan kebijakan pembatasan arus orang masuk yang dengan demikian dapat mempengaruhi potensi penempatan PMI. Perkembangan ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan devisa negara dengan bertambahnya remitansi yang dikirimkan dari para PMI. Oleh karena itu, peluang ini perlu ditangkap dengan tetap memperhatikan kesejahteraan PMI di luar negeri.

Isu Terkini tentang Pekerja Migran Indonesia

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh pada pengurangan tenaga kerja karena adanya efisiensi di sektor usaha. Selain itu, penurunan tenaga kerja juga terjadi karena pembatasan wilayah, yang berdampak tidak hanya pada tenaga kerja dari negara tersebut tetapi juga tenaga kerja dari luar daerah atau negara. Hal ini sehubungan dengan kebijakan berbagai negara yang menetapkan pembatasan masuk negara untuk non-resident dan warganegara dalam rangka upaya untuk mencegah persebaran COVID-19. Kondisi ini membuat terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai negara.

Seiring dengan upaya penanggulangan COVID-19 yang semakin *massive* dengan adanya vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan mekanisme *tracing* yang lebih baik, hal ini membuat beberapa negara mulai melonggarkan kebijakan pembatasan arus masuk masing-masing negara, di samping juga dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kondisi ini membuka kesempatan bagi PMI untuk kembali ditempatkan di negara-negara tersebut. Melihat peluang ini, Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/2748/PK.02.02/VIII/2021 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, menyampaikan mengenai negara-negara yang membuka kesempatan bagi PMI untuk masuk ke negara mereka.

Dalam Kepdirjen tersebut, diketahui bahwa terdapat 56 negara yang telah membuka kesempatan bagi PMI untuk masuk, dan secara umum jenis atau sektor pekerjaan yang dibuka adalah semua sektor pekerjaan yang berbadan hukum. Adapun skema penempatan yang dibuka mayoritas merupakan penempatan oleh perusahaan penempatan PMI (P to P) maupun skema PMI perseorangan. Skema penempatan oleh

badan perlindungan PMI (G to G atau G to P) masih terhitung terbatas jika dibandingkan dengan dua skema lainnya yaitu dibuka oleh negara Jepang, Jerman, dan Persatuan Emirat Arab. Umumnya skema G to G atau G to P dibuka karena sudah adanya kerangka kerjasama antara Indonesia dengan negara tujuan. Meskipun telah terdapat angin segar bagi PMI untuk dapat ditempatkan di 56 negara tersebut, terlihat bahwa mayoritas negara bukan merupakan negara yang menjadi pilihan favorit atau tujuan utama dari PMI.

Kondisi Terkini Pekerja Migran Indonesia

Pada Agustus 2021, tercatat bahwa ada 5.222 PMI yang ditempatkan di berbagai negara. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan penempatan sebanyak 4.807 PMI pada Juli 2021 walaupun masih di bawah angka pada Juni 2021 (6.880 PMI). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Agustus 2020), PMI pada Agustus 2021 tercatat meningkat sedikit yaitu 3,98%. Meskipun demikian, angka pada kedua tahun dalam periode pandemic ini masih jauh jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi (Agustus 2019) yang tercatat sebanyak 21.833 PMI.

Jika dilihat berdasarkan provinsinya, tercatat bahwa penempatan paling banyak secara konsisten antar periode masih berasal dari Jawa Timur (40,63%) disusul kemudian dengan Jawa Tengah (23,03%) dan Jawa Barat (16%). Daerah dari luar Jawa yang paling banyak menyumbang PMI adalah Bali dan Lampung. Sedangkan jika dilihat berdasarkan provinsi yang paling sedikit menyumbang PMI adalah provinsi-provinsi di Indonesia bagian tengah, antara lain adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara. Dari kota dan kabupaten, kota/ kabupaten yang merupakan daerah paling banyak PMI berasal adalah Malang, Indramayu, dan Blitar.

Tabel 1. PMI Berdasarkan Provinsi

Provinsi Tertinggi	PMI Agustus 2021
Jawa Timur	2.122
Jawa Tengah	1.203
Jawa Barat	839
Bali	308
Lampung	288
Provinsi Terendah	PMI Agustus 2021
Aceh	3
Kepulauan Riau	3
Sulawesi Tenggara	3
Kalimantan Tengah	1
Kalimantan Utara	1

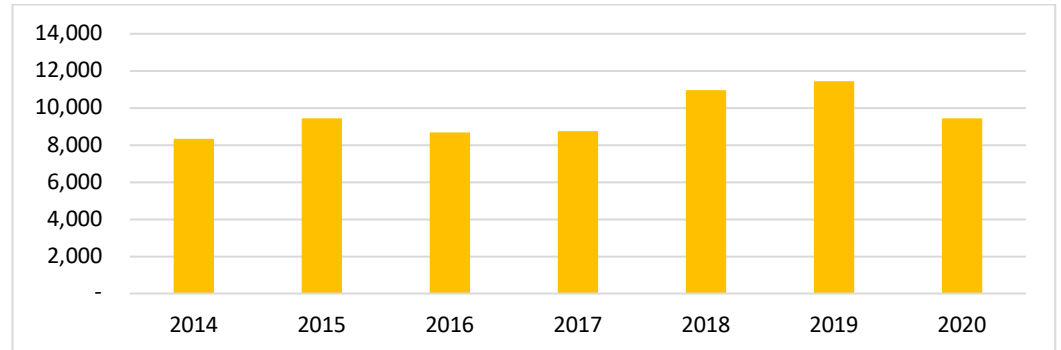
Berdasarkan jenis kelaminnya, mayoritas PMI adalah perempuan yaitu sebanyak 87% sedangkan laki-laki hanya tercatat 13%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan sektor pekerjaannya, pekerja di sektor informal masih lebih banyak (71%) jika dibandingkan dengan pekerja formal (29%). Lebih lanjut lagi, latar belakang pendidikan PMI paling banyak merupakan lulusan SMA dan SMP yang masing-masing sebanyak 34,5% dan 33%. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa dari sisi penawaran PMI, lebih banyak merupakan *low-skilled worker* terutama jika dilihat berdasarkan sektor dan latar belakang pendidikan. Selain itu, jika dilihat dari jenis jabatan, PMI yang merupakan pekerja domestik masih paling banyak dibandingkan dengan jenis jabatan lainnya.

Diketahui bahwa negara dengan penempatan terbanyak pada Agustus 2021 adalah Hongkong (78,78%) disusul kemudian Taiwan (12,52%) dan Jepang (4,82%). Hal ini sejalan dengan kebutuhan pekerja di negara-negara tersebut yang juga tinggi. Tercatat bahwa Hongkong dengan pertumbuhan populasi yang menua dengan cepat membutuhkan lebih banyak pembantu rumah tangga dengan estimasi sebanyak 240.000 orang. Hal ini membuka banyak kesempatan bagi pekerja dari negara lain untuk mengirimkan pekerjaannya. Akan tetapi, persaingan untuk mengirimkan pekerja juga tinggi karena banyak pekerja dari negara lain seperti Filipina, Kamboja, dan Myanmar.

Dengan adanya peluang dan potensi pasar yang besar di luar negeri serta penawaran PMI yang tinggi dari dalam negeri, Indonesia memiliki kesempatan luas untuk meningkatkan devisa dalam bentuk remitansi. Meskipun masih lebih banyak dikuasai oleh *low skilled worker*, PMI ini mempunyai peran penting di ekonomi Indonesia karena memberikan tambahan devisa.

Peran Remitansi di Indonesia

Remitansi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dari tahun ke tahun, remitansi Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat terutama pada tahun 2017 dan 2019. Akan tetapi, karena adanya Pandemi COVID-19, terjadi penurunan remitansi akibat penurunan penempatan PMI di berbagai negara karena pembatasan wilayah dan arus orang masuk. Penurunan remitansi terlihat pada tahun 2020 dan dimungkinkan untuk masih cukup rendah pada tahun 2021 karena pada Q1 2021 tercatat bahwa remitansi PMI sebesar USD 2.260 juta, lebih rendah dibandingkan dengan periode Q1 2020 yang tercatat sebesar USD 2.600 juta.



Gambar 1. Remitansi dari PMI (Juta USD)

Sumber: Bank Indonesia dan BNP2TKI (2021)

Meskipun tercatat bahwa PMI paling banyak berasal dari Hongkong, remitansi PMI paling banyak justru berasal dari Timur Tengah seperti Arab Saudi dan ASEAN seperti Malaysia yang masing-masing sebesar USD 3.803 juta dan USD 3.252 juta pada tahun 2019. Sedangkan PMI yang ditempatkan di Hongkong pada tahun 2019, tercatat menyumbang PMI sebanyak USD 1.229 juta. Angka tersebut secara proporsional menurun pada

Dengan memperhatikan potensi dan peluang penempatan PMI di luar negeri dan devisa yang akan dihasilkan dari remitansi, penting untuk memanfaatkan potensi ini dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Selain itu, penting juga bagi pemerintah harus tetap memperhatikan dan aktif menjaga kesejahteraan PMI di luar negeri, terutama jika dikaitkan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap PMI maupun pelanggaran hak lainnya tidak lagi terjadi di masa depan.

Referensi:

https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf

https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_15-09-2021_LAPORAN_PENGOLAHAN_DATA_PMI_BULAN_agustus.pdf

https://jdih.bp2mi.go.id/uploads/20210907/20210907135328_8889075_SK_Perubahan_kelima_Kepdirjen_Tentang_Penempatan_Negara_Tujuan_ADB.pdf

